

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR SHINTA DAYA  
TAHUN 2023**



**Jl. Raya Yogya-Solo KM. 15 Bogem, Tamanmartani Kalasan,  
Sleman, D.I. Yogyakarta  
TELEPON: (0274) 496036, 496074**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Shinta Daya pada tahun 2023 telah membawa perkembangan BPR menjadi lebih baik meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 di tengah era digitalisasi dan pemulihan serta kebangkitan ekonomi atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Shinta Daya memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Shinta Daya dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Shinta Daya didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Shinta Daya.

BPR Shinta Daya telah beroperasi lebih dari 53 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi Bank Terbaik dan Terpercaya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat DIY dan Jateng.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Shinta Daya selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang tahun 2023 dan untuk di tahun-tahun mendatang, BPR Shinta Daya terus berupaya untuk mewujudkan hal - hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Suitbertus Fajar Nugraha
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tanggung Jawab :			
<ol style="list-style-type: none"><li>Memimpin dan mengelola PT BPR Shinta Daya sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perusahaan serta Garis Besar Program yang telah disampaikan dan disepakati pada Rapat Umum Pemegang Saham.</li><li>Bertanggung jawab atas keberlangsungan hidupnya dan kinerja Bank.</li><li>Bertanggung jawab atas perumusan kebijakan-kebijakan Bank.</li><li>Bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan rencana, pengawasan, pengendalian operasional Bank.</li><li>Melaksanakan tanggung jawab langsung dan pengendalian khusus yang meliputi pembinaan dan pengelolaan kredit, dana, peningkatan efisiensi dan optimalisasi sarana pendukung operasional dan mobilisasi dana, pengembangan Sumber Daya Manusia, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal, mitigasi risiko atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank, serta meningkatkan citra positif Bank di masyarakat.</li><li>Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.</li></ol>			
Rincian Tugas :			
<ol style="list-style-type: none"><li>Memprakarsai penyusunan program kerja dan rencana anggaran yang akan ditetapkan menjadi target yang akan dicapai oleh perusahaan.</li><li>Mengevaluasi dan menganalisis perkembangan bank.</li><li>Mengendalikan dan menentukan langkah-langkah pengawasan operasional bank.</li><li>Melakukan penilaian, menyetujui, menerima atau menolak realisasi semua transaksi produk perbankan berdasarkan kewenangan tertinggi yang ada.</li><li>Memonitor dan mengawasi berlangsungnya kegiatan administrasi pelayanan perbankan.</li><li>Memutus plafond kredit yang diusulkan oleh bagian terkait yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian.</li><li>Meninjau kembali, meneliti, menilai dan menyetujui atau menolak permohonan kredit yang telah diproses dan dinilai bawahan (Account Officer, kredit Pegawai, Kredit Premium, Kasi Marketing Wilayah, Analis Kredit, Kabag Kredit, Kabag Marketing Cabang, Pemimpin Cabang dan Kepala Divisi Bisnis).</li></ol>			



2.	Nama	:	Johannes Bosco Herimahadi
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :			
Tanggung Jawab :			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Operasional dalam hal mengamankan semua Keputusan dan Kebijakan Direksi, baik yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) atau melalui Surat Edaran (SE) lainnya serta Memo Direksi.</li><li>2. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Operasional melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku.</li><li>3. Menjamin terlaksananya rencana kerja yang akan dicapai oleh masing-masing unit tugas dari tingkat Kepala Divisi sampai dengan pelaksana, melalui pengawasan dan evaluasi hierarkis yang dapat dikendalikan lewat jalur Struktur Organisasi.</li><li>4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.</li></ol>			
Rincian Tugas			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Operasional mengambil langkah-langkah preventif bagi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kegiatan operasional perbankan.</li><li>2. Melakukan pengawasan atas terlaksananya program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).</li><li>3. Memantau kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme).</li><li>4. Memantau identifikasi nasabah baru berikut transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.</li><li>5. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis.</li><li>6. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain.</li><li>10. Membuat laporan kerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama.</li></ol>			
3.	Nama	:	Laurentia Dyah Widia
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :			
Tanggung Jawab :			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur Bisnis melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku.</li><li>2. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Surat Keputusan (SK) dan Surat Edaran (SE) yang telah dikeluarkan dan masih berlaku</li><li>3. Melaksanakan tanggung jawab langsung dan pengendalian khusus yang meliputi peningkatan kualitas administrasi/ pembukuan, pengembangan Sumber Daya Manusia, peningkatan efisiensi dan optimalisasi sarana pendukung operasional, pengamanan data nasabah baik kredit maupun dana yang bisa diakses melalui CBS (Core Banking System), mengupayakan pengembangan dan penelitian atas produk yang ada, serta memastikan keamanan dari segi hukum atas operasional Bank.</li><li>4. Mengusahakan berlangsungnya pemeliharaan dan perawatan atas semua asset perusahaan secara baik.</li></ol>			



5. Mengusahakan agar pelayanan kepada nasabah berlangsung secara baik

Rincian Tugas :

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan administrasi dan pelayanan perbankan.
2. Bersama-sama Direktur Utama dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan mengambil langkah- langkah preventif bagi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kegiatan operasional perbankan.
3. Memonitor dan mengevaluasi serta mengusahakan agar likuiditas keuangan tetap dalam posisi aman dan sehat.
4. Menjaga semua asset perusahaan, baik asset lancar maupun berupa asset aktiva tetap dalam keadaan aman.
5. Mengawasi pembuatan perhitungan pajak atas semua pajak yang dibebankan kepada perusahaan.
6. Mengamankan/menyimpan kunci utama khasanah.
7. Memantau tingkat pelayanan dan citra Bank ditengah masyarakat serta mencari solusi apabila terdapat masalah yang berkaitan terhadap hal itu.
8. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
9. Membuat laporan kerja dan menyampaikan kepada Direktur Utama.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
2. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
3. Pemberkasan dengan cara digital filling telah dilaksanakan.
4. Direksi monitoring secara ketat dan konsisten untuk kredit yang masuk dalam pengawasan khusus dan penyelesaian kredit bermasalah.
5. Inovasi terkait digital banking sudah dilaksanakan dengan adanya virtual account dan e-money dan telah dilakukan kerja sama dengan Bank Mandiri.
6. Direksi sangat memperhatikan aspek legalitas & appraisal atas jaminan secara profesional dan mengedepankan prinsip kehati - hatian.
7. Direksi selalu dan terus berusaha untuk menurunkan NPL dan menambah jumlah NOA.
8. Untuk nasabah yang terkena dampak Covid- 19 dan mendapatkan relaksasi yang sudah jatuh tempo grace period menjadi perhatian khusus Direksi dan dimonitor secara ketat.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Octavianus Sunyi Haryanto
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tanggung Jawab			
1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.			
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.			
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan			



(OJK) maupun Otoritas lainnya.

4. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rincian Tugas

1. Melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus terhadap jalannya perusahaan.
2. Memberikan nasehat, mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
3. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pelaksanaannya.
4. Mengawasi pekerjaan Direksi (meminta keterangan-keterangan).
5. Menyetujui kebijakan penerapan Prinsip mengenal Nasabah (KYC).
6. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Direksi BPR.
7. Mengawasi pelaksanaan APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme)
8. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
9. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
10. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
11. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

2. Nama : Nicolaus Ndaru Sunarwibowo

Jabatan : Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab :

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas lainnya.
4. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rincian Tugas

1. Melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus terhadap jalannya perusahaan.
2. Memberikan nasehat, mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
3. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pelaksanaannya.
4. Mengawasi pekerjaan Direksi (meminta keterangan-keterangan).
5. Menyetujui kebijakan penerapan Prinsip mengenal Nasabah (KYC).
6. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Direksi BPR.
7. Mengawasi pelaksanaan APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme)
8. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko.
9. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.



- |   |
|---|
| 10. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.<br>11. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. |
|---|

**Rekomendasi Kepada Direksi :**

1. Monitoring/ kontrol setiap putusan, perlu dibuat SE ataupun SK tentang Surat Peringatan (SP) kepada nasabah kredit, sehingga diharapkan proses - proses penanganan kredit bermasalah dapat berjalan dengan landasan hukum yang ada.
2. Konsultasi dengan vendor (Pintek) kalau memungkinkan untuk menerapkan denda kredit dengan sistem auto debet, sebagai edukasi nasabah untuk selalu tepat waktu dalam pembayaran angsuran.
3. Dalam rangka menekan NPL perlu diberlakukan punishmen AO dan para pemutus, untuk lebih berhati - hati.
4. Mengevaluasi bunga pinjaman sebagai penghasil utama BPR yang terkoreksi cukup banyak dari rencana, perlu ditelusuri sebabnya.
5. Untuk diterapkan reward karyawan yang mendapatkan tabungan. Mengingat komposisi Tabungan dan Deposito yang lebih besar di Deposito supaya menurunkan biaya bunga.
6. Penanganan kredit terdampak Covid - 19, agar diselesaikan sebelum Maret 2023.
7. Kredit Relaksasi yang memang sudah menyerahkan diri, agar segera dieksekusi saja.
8. Pengembalian PPAP diusahakan maksimal untuk mengejar rencana Laba yang terkoreksi.
9. Mengurangi Kredit Pegawai yang berisiko tinggi apalagi dengan pendapatan bunga yang kecil, jangan ikut arus dengan pesaing.
10. Peningkatan NOA Tabungan dan Deposito dioptimalkan pada nasabah - nasabah yang tidak terlalu besar. untuk menyebarkan risiko penarikan nominal besar.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Tidak ada

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tidak ada	



## b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	Tidak ada	

## c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak ada			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Suitbertus Fajar Nugraha	Rp1.928.000.000	7.74%
2.	Johannes Bosco Herimahadi	Rp0	0%
3.	Laurentia Dyah Widia	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			



- Direktur Utama memiliki saham pada BPR sebesar 7,74 % tapi tidak memiliki saham di perusahaan lain.
- Anggota Direksi yang lain tidak memiliki saham pada BPR dan perusahaan lain.

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Suitbertus Fajar Nugraha	-	-	0%
2.	Johannes Bosco Herimahadi	-	-	0%
3.	Laurentia Dyah Widia	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Suitbertus Fajar Nugraha	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Johannes Bosco Herimahadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Laurentia Dyah Widia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada hubungan keuangan.				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Suitbertus Fajar Nugraha	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Johannes Bosco Herimahadi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Laurentia Dyah Widia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga.				



## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Octavianus Sunyi Haryanto	Rp0	0%
2.	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo	Rp2.140.000.000	8.59%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Bapak Nicolaus Ndaru Sunarwibowo memiliki saham sebesar 8,59%			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Octavianus Sunyi Haryanto	-	-	0%
2.	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Octavianus Sunyi Haryanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan.				



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Octavianus Sunyi Haryanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga.				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp1.291.140.000	2	Rp426.000.000
2.	Tunjangan	3	Rp105.800.000	2	Rp35.500.000
3.	Tantiem	3	Rp450.058.344	2	Rp200.628.418
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp7.810.000	2	Rp2.020.000
Total			Rp1.854.808.344		Rp664.148.418
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (3)	BPJS (2)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tidak ada			



## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.07 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.3 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.22 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.05 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.65 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Tidak ada	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	12 Januari 2023	5	1. Pembahasan laba Desember 2022, deviden dan penambahan modal di RUPS tutup buku 2022 2. Pembahasan proses finishing kantor cabang Wonosari dan mapping area Wonosari 3. Pembahasan terkait efisiensi
2.	14 Maret 2023	5	1. Pembahasan terkait OSC dan pendapatan bunga 2. Pembahasan penyaluran kredit mikro ke pasar-pasar 3. Pembahasan terkait CBS baru (MSO) 4. Pembahasan mitigasi risiko hukum dan penyelesaian kredit bermasalah
3.	14 April 2023	5	1. Pembahasan OSC kredit yang terkoreksi dengan pencapaian 97,41% dari target 2. Pembahasan penyisihan biaya THR 3. Pembahasan setoran kredit setelah libur Lebaran 4. Pembahasan rencana pindahan kantor dari cabang Sentolo ke Wates
4.	12 Mei 2023	5	1. Pembahasan beban PPAP 2. Pembahasan kewajiban marketing kredit untuk masuk ke pasar - pasar di wilayah pemasaran masing - masing
5.	13 Juni 2023	5	1. Pembahasan OSC kredit yang masih terkoreksi



			dari rencana targetnya, dengan pencapaian baru 95,21% dari target 2. Pembahasan munculnya biaya PPAP
6.	11 Juli 2023	5	1. Pembahasan OSC kredit s/d semester I dengan pencapaian masih 94,85% 2. Pembahasan POJK no.8 tahun 2023 tentang Penerapan program APU PPT dan PPPSPM dan review pelatihan APU PPT yang telah dilaksanakan
7.	11 Agustus 2023	5	1. Pembahasan pendapatan yang tidak sesuai target dan biaya - biaya yang tidak efisien 2. Pembahasan kendala - kendala dari sistem MSO yang masih muncul
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 7 kali dalam 1 tahun			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Octavianus Sunyi Haryanto	7	0	100%
2.	Nicolaus Ndaru Sunarwibowo	7	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak ada				



## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada BPR Shinta Daya yang dapat berpengaruh secara kontraproduktif terhadap kondisi keuangan Bank.								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	3	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
1. Gugatan atas nama Tutik Supriyani ditolak oleh PN 2. Gugatan atas nama Edi Susanto masih proses Mediasi 3. Gugatan atas nama Eviana Tri Wulandari menunggu sidang penetapan		



### K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada							

### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	09 November 2023	Sosial	HUT Brimob ke 78	SatBrimob DIY	Rp10.000.000
2.	30 November 2023	Sosial	Iklan kalender	GKI Adisucipto	Rp3.500.000
3.	01 Desember 2023	Sosial	HUT SMA De Brito	SMA De Brito	Rp7.500.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada					



## BAB III

### HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR SHINTA DAYA
Alamat	: Jl. Raya Yogya- Solo KM. 15 Bogem, Tamanmartani Kalasan, Sleman, D.I. Yogyakarta
Nomor Telepon	: (0274) 496036, 496074
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp39.504.442.238
Total Aset	: Rp380.148.801.732

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR SHINTA DAYA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 1.7 dengan predikat Sangat Baik (1)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.40	0.280
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.51	0.227
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.00	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.90	0.190
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.90	0.190
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.05	0.026
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.84	0.184
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.90	0.143
10	Rencana Bisnis BPR	1.90	0.143
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.00	0.150
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.7</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.4)**

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab (Nilai S + P + H : 1.4)

Jumlah anggota Direksi BPR Shinta Daya 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) Direktur Utama yang juga merupakan Direktur Bisnis, 1 (satu) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan 1 (satu) Direktur Operasional.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.51)**

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.51)

Jumlah anggota Dewan Komisaris BPR Shinta Daya sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri atas 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak Menerapkan Komite.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)**

Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

BPR Shinta Daya telah memiliki Kebijakan penanganan benturan kepentingan dan telah dilaksanakan dengan baik.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)**

Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR Shinta Daya telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan yang berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah - langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang di lakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang - undangan.

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.9)**

Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.9)

PE Audit Intern di BPR Shinta Daya telah melaksanakan penerapan fungsi audit intern dan independen terhadap satuan kerja operasional serta telah menyampaikan Laporam Hasil Audit kepada Internal dan kewajiban pelaporan ke pihak eksternal (OJK).

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.05)**



Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.05)

BPR Shinta Daya telah menugaskan Audit Eksternal sesuai dengan ketentuan dan hasil Audit Eksternal dimaksud telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi BPR.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.84)**

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.84)

BPR Shinta Daya telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan telah menilai hasil penerapan Manajemen Risiko dalam bentuk Profil Risiko sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pengendalian internal kontrol. Laporan Profil Risiko dimaksud juga telah disampaikan ke OJK 2 (dua) kali dalam setahun.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)**

Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.9)

BPR Shinta Daya telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin, BPR Shinta Daya dalam menjalankan operasional Bank selalu berhati-hati agar tidak melanggar BMPK.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)**

Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.9)

Rencana Bisnis Bank BPR Shinta Daya telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)**

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR Shinta Daya telah didukung oleh sistem pelaporan keuangan dan non keuangan. BPR Shinta Daya juga telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif atau kelebihan Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing - masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi kekurangan aspek struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional dan menghadapi persaingan yang semakin ketat BPR Shinta Daya harus mengikuti perkembangan terkini yang sekarang sudah masuk ke era digital dan juga masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas sesuai bidang dan kebutuhan dan juga untuk persiapan mengganti beberapa karyawan yang sudah mendekati masa purna tugas (pensiun).

Untuk faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan selalu dilakukan perbaikan dan dilaksanakan dengan baik. BPR Shinta Daya senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara untuk aturan dan ketentuan



internal terus dilakukan perbaikan agar selaras dan sejalan dengan ketentuan terbaru dari regulator dan juga untuk menyelaraskan dari perkembangan operasional internal BPR Shinta Daya, sehingga dapat merespon persaingan, perkembangan, perubahan dan tantangan bisnis yang terjadi saat ini.

Selanjutnya dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa BPR Shinta Daya dapat beroperasi dengan baik dan mendapatkan hasil dan kinerja yang baik, kecukupan permodalan masih memadai dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usahanya. Sedangkan kekurangan dari sisi aspek Hasil tahun 2023 secara pencapaian dari target masih kurang maksimal dan penambahan NPL yang harus menjadi perhatian.

Sleman, 24 Januari 2024

**PT. BPR SHINTA DAYA**

Suitbertus Fajar Nugraha  
Direktur Utama



Octavianus Suny Haryanto  
Komisaris Utama